



BUPATI MAMBERAMO RAYA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA NOMOR 3
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4709);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 88 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotogan Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Mamberamo Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamberamo Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 disisipkan ayat dua (2) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan.
- (2) Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan:

- a. 4% (empat persen) dibayar ADK ; dan
 - b. 1% (satu persen) dibayar dari peserta.
- (2a) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besar Iuran bagi kepala kampung dan perangkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar upah minimum kabupaten.
- (2b) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan upah minimum kabupaten maka yang menjadi dasar perhitungan besaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) yaitu sebesar upah minimum provinsi.
- (3) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung;
2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga bunyinya sebagai berikut :
- (1) Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya mengalokasikan ADK Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 70.285.848.500,00 (tujuh puluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - (2) ADK sebesar Rp. 70.285.848.500,00 (tujuh puluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dialokasikan untuk 60 (enam puluh) Kampung di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - (3) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga kepada Kampung Kwa yang merupakan bagian kampung sah dari wilayah Kabupaten Mamberamo Raya;
 - (4) Ayat (4) dihapus.
3. Ketentuan Lampiran I yang lama diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamberamo Raya

Ditetapkan di Burmeso
pada tanggal 10 Janu 2021
BUPATI MAMBERAMO RAYA,
ttd.
DORINUS DASINAPA

Diundangkan di Burmeso
Pada tanggal 10 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,
ttd.

SUWITA,S.Sos,M.Ec.Dev
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19681223 199201 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Mamberamo Raya,



Yakobus Kawena, SH.
NIP.19840405 200909 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Dirjen Perimbangan Keuangan RI;
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jayapura;
3. Untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAMBERAMO RAYA
 NOMOR 6 TAHUN 2021
 TANGGAL 10 JANUARI 2021

RINCIAN DANA ALOKASI DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	DISTRIK	NAMA KAMPUNG	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	Pagu Alokasi Dana Desa per-Kampung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	MAMBERAMO TENGAH	BURMESO	921,781,600	214,873,200	1,136,654,800
2	MAMBERAMO TENGAH	ANGGRESO	921,781,600	245,629,900	1,167,411,500
3	MAMBERAMO TENGAH	KASONAWEJA	921,781,600	223,894,200	1,145,675,800
4	MAMBERAMO TENGAH	METAWEJA	921,781,600	228,355,900	1,150,137,500
5	MAMBERAMO TENGAH	NAMUNAWEJA	921,781,600	204,429,300	1,126,210,900
6	MAMBERAMO TENGAH	DANAU BIRA	921,781,600	230,030,200	1,151,811,800
7	MAMBERAMO TENGAH	MURU MARE	921,781,600	217,364,800	1,139,146,400
8	MAMBERAMO TENGAH	KWERBA	921,781,600	203,746,000	1,125,527,600
9	MAMBERAMO TENGAH	SOSAWAKWESAR	921,781,600	212,840,200	1,134,621,800
10	MAMBERAMO TENGAH	BABIJA	921,781,600	200,811,500	1,122,593,100

11	MAMBERAMO TENGAH	MARINA VALEN	921,781,600	195,807,100	1,117,588,700
12	MAMBERAMO HULU	DABRA	921,781,600	261,775,300	1,183,556,900
13	MAMBERAMO HULU	TAIYEVE	921,781,600	188,085,800	1,109,867,400
14	MAMBERAMO HULU	FUAO	921,781,600	223,351,700	1,145,133,300
15	MAMBERAMO HULU	PEPASENA I	921,781,600	238,884,000	1,160,665,600
16	MAMBERAMO HULU	PEPASENA II	921,781,600	184,847,700	1,106,629,300
17	MAMBERAMO HULU	DOU	921,781,600	285,284,800	1,207,066,400
18	MAMBERAMO HULU	KWA	921,781,600	257,599,300	1,179,380,900
19	MAMBERAMO HULU	FOKRI	921,781,600	269,149,500	1,190,931,100
20	MAMBERAMO HULU	HAIYA	921,781,600	204,822,200	1,126,603,800
21	RUFAER	FONA	921,781,600	190,958,600	1,112,740,200
22	RUFAER	TAYAI	921,781,600	284,174,600	1,205,956,200
23	RUFAER	BARERI	921,781,600	221,595,800	1,143,377,400
24	RUFAER	SIKARI	921,781,600	291,739,900	1,213,521,500
25	RUFAER	TARIA	921,781,600	196,060,900	1,117,842,500
26	RUFAER	KAI	921,781,600	226,404,000	1,148,185,600
27	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	KUSTRA	921,781,600	171,155,300	1,092,936,900
28	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	NOYADI	921,781,600	226,236,300	1,148,017,900
29	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	OBOGOI	921,781,600	220,519,800	1,142,301,400
30	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	BIRI	921,781,600	228,319,000	1,150,100,600
31	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	WAKEYADI	921,781,600	193,926,500	1,115,708,100
32	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	ERI	921,781,600	214,875,200	1,136,656,800
33	MAMBERAMO TENGAH TIMUR	TOWAO	921,781,600	276,096,600	1,197,878,200
34	MAMBERAMO HILIR	BAUDI	921,781,600	221,715,700	1,143,497,300
35	MAMBERAMO HILIR	TRIMURIS	921,781,600	231,337,900	1,153,119,500
36	MAMBERAMO HILIR	BAGUSA	921,781,600	214,237,800	1,136,019,400

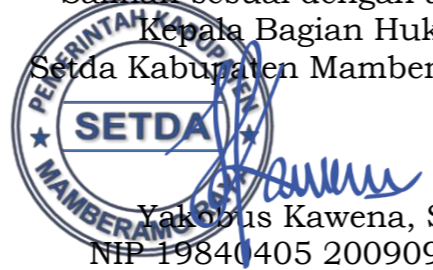
37	MAMBERAMO HILIR	KAPESO	921,781,600	221,590,400	1,143,372,000
38	MAMBERAMO HILIR	SUASESO	921,781,600	202,683,800	1,124,465,400
39	MAMBERAMO HILIR	WAREMBORI	921,781,600	222,563,000	1,144,344,600
40	MAMBERAMO HILIR	YOKE	921,781,600	202,483,500	1,124,265,100
41	MAMBERAMO HILIR	TAYA	921,781,600	186,851,500	1,108,633,100
42	WAROPEN ATAS	NADOFOAI	921,781,600	269,493,200	1,191,274,800
43	WAROPEN ATAS	BARAPASI	921,781,600	258,140,300	1,179,921,900
44	WAROPEN ATAS	SIPISI	921,781,600	332,759,300	1,254,540,900
45	WAROPEN ATAS	BARIWARO	921,781,600	299,735,000	1,221,516,600
46	WAROPEN ATAS	BENSOR	921,781,600	294,239,500	1,216,021,100
47	WAROPEN ATAS	RAWIWA	921,781,600	237,276,800	1,159,058,400
48	WAROPEN ATAS	MARIKAI	921,781,600	268,773,800	1,190,555,400
49	BENUKI	KAMAI	921,781,600	209,753,900	1,131,535,500
50	BENUKI	DADAT	921,781,600	227,726,400	1,149,508,000
51	BENUKI	KEREMA	921,781,600	212,510,200	1,134,291,800
52	BENUKI	TEUW	921,781,600	206,160,700	1,127,942,300
53	BENUKI	WATIARO	921,781,600	256,549,900	1,178,331,500
54	BENUKI	GESA BARU	921,781,600	244,647,000	1,166,428,600
55	BENUKI	BAITANASA	921,781,600	268,276,700	1,190,058,300
56	SAWAI	POIWAI	921,781,600	253,267,400	1,175,049,000
57	SAWAI	TAMAKURI	921,781,600	195,979,800	1,117,761,400
58	SAWAI	BONOI	921,781,600	230,584,600	1,152,366,200
59	SAWAI	SORABI	921,781,600	215,275,500	1,137,057,100
60	SAWAI	RAPAMEREI	921,781,600	244,790,000	1,166,571,600
61	SAWAI	ANASI	921,781,600	194,122,200	1,115,903,800
Total			56,228,677,600	14,057,170,900	70,285,848,500

BUPATI MAMBERAMO RAYA,

ttd.

DORINUS DASINAPA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Mamberamo Raya,



Yakobus Kawena, S.H.
NIP 19840405 200909 1 002